

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Andrea Arneyani Banusu
andreaarneyani@gmail.com
Anang Subarjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the influence of budget preparation participation, human resource quality, internal control system, and the use of information technology to the performance of local government institution on the Local Apparatus Working Unit of Surabaya city. The data is the primary data. The data has been collected by issuing questionnaires to the respondents. The total amount of the research samples are the entire employees on 17 Local Apparatus Working Units of Surabaya city and the sample collection technique has been done by using purposive sampling and the 64 respondents in 17 Local Apparatus Working Units of Surabaya city have been selected as samples. The criteria are: civil servant i.e. the accounting department staff and budgetary department staff. The data analysis has been carried out by using multiple linear regressions analysis and the SPSS 20.0 software for windows to process the questionnaire data. The result of the research shows that budget preparation participation, human resource quality, internal control system, and the use of information technology give positive influence to the performance of the Local Government institution.

Keywords: Performance, human resources quality, information technology, budget, internal control system

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jumlah sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 17 Dinas SKPD Kota Surabaya dan teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak sebanyak 64 pegawai di 17 SKPD Kota Surabaya. Dengan kriteria: Pegawai Negeri Sipil yaitu staff bagian akuntansi dan bagian anggaran. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software spss 20.0 for windows* untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Kata kunci : kinerja, kualitas SDM, teknologi informasi, anggaran, sistem pengendalian intern.

PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban atas kinerja dan pengalokasian dana secara baik dan transparan, sehingga akan berakibat baik pada pembangunan daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah mengolah dana publik yang didasarkan pada konsep anggaran kinerja yang berorientasi bukan hanya pada input. Selain itu, kinerja pemerintah daerah pun di nilai berdasarkan berbagai faktor- faktor antara lain sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Bastian (2006:267) menyatakan bahwa Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Apabila penyusunan dan penetapan indikator kinerja pemerintah daerah telah memenuhi syarat berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Pada kenyataannya hasil temuan di lapangan, kinerja pemerintah daerah masih sangat rendah baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Diungkapkan dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 dalam 704 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan dari 6.548 jumlah temuan. Hasil pemeriksaan tersebut memuat temuan yang terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (www.bpk.go.id). Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2015 mengatakan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada pemda masih belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya beberapa yang perlu mendapat perhatian diantaranya terkait penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah belum mencakup seluruh perlakuan akuntansi baik dalam hal pengakuan, pencatatan, penilaian, klasifikasi, dan pengungkapan. Serta penyiapan dan pembinaan SDM kepada pemerintah daerah terkait dengan aplikasi dalam penerapan SAP berbasis akrual belum optimal. Dan banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi mengakibatkan menurunnya kinerja instansi pemerintah sehingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal ini juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Melihat belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah, maka perlu dilakukan upaya untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja instansi pemerintah. Rahadi, 2007 (dalam Chintya, 2015) menunjukkan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dimana disebutkan kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perkembangan pengendalian intern pada sektor publik di Indonesia sangatlah besar. Melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, pengendalian intern menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja adalah adanya partisipasi anggaran yang merupakan keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Hal

ini ditegaskan oleh Hansen dan Mowen (2002) mengatakan partisipasi anggaran pada dasarnya melibatkan peran manajer tingkat bahwa memberi pertimbangan bagaimana anggaran direncanakan. Menurut Agusti (2012) partisipasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran

Berdasarkan fenomena di atas dapat dikatakan menurunnya penilaian kinerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak memadainya SDM, tidak adanya keterlibatan pegawai dalam penyusunan anggaran, lemahnya sistem pengendalian intern, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria, maka peneliti tertarik untuk menguji "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah".

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Pada organisasi sektor publik bertujuan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan berkaitan praktek pelaporan kinerja merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan kinerja, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi kinerja yang bermanfaat bagi para pengguna informasi yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada *principal* yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 mendefinisikan Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Sinambela dalam Nurlaili (2014) Kinerja yaitu hasil yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.

Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2006:145) pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: 1) tujuan, sasaran dan strategi organisasi, 2) indikator dan ukuran kinerja, 3) tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi dan evaluasi kinerja. Fokus pengukuran kinerja terletak pada *outcome* atau hasil bukan pada *input* dan proses. Hasil yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi sektor publik.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka (Agusti, 2012).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah sejauh mana tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, dan perilaku yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

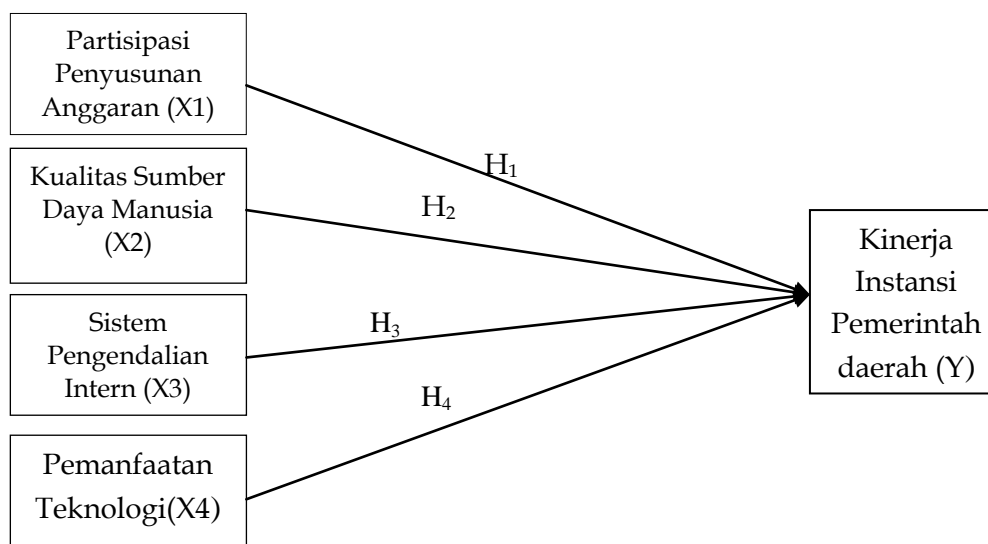
Sistem Pengendalian Intern

PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga mewajibkan pemerintah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah agar tercapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et al.* (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna system informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaannya. Demikian pula disebutkan dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik.

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Partisipasi anggaran adalah tingkat sejauh mana individu terlibat dan berpengaruh dalam menentukan dan menyusun anggaran suatu organisasi baik secara periodik maupun tahunan. Keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu organisasi sangatlah penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bagian untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang di embannya sehingga pegawai dan kepala bagian dapat meningkatkan kinerja agar tercapainya target anggaran (Dewi et al, 2015). Pengujian ini membuktikan bahwa keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga adanya hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja instansi pemerintah daerah dan untuk menguji kembali, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber Daya Manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* yang dimaksudkan berupa pengetahuan, pendidikan, sikap, hubungan, produktivitas, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk sebagai input dalam perolehan kinerja yang maksimal. Ariesta (2013) mengatakan apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Dewi et al., 2015). Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka kinerja pemerintah juga akan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menduga adanya hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja instansi pemerintah daerah dan hubungan tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₂: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

American Institute of Certified Public Accounting mendefinisikan pengendalian intern, yaitu meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat dikordinasikan, yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi dan data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan diterapkan sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi diharapkan dapat mengurangi terjadinya eksposur-eksposur dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik pula, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian Chintya (2015) mengemukakan pengendalian intern pemerintah pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Solok. Serta mengacu pada penelitian Dewi et al. (2015) berhasil menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menduga adanya hubungan antara sistem pengendalian intern dan kinerja instansi pemerintah daerah, maka penulis mengambil hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

PP No.56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang mewajibkan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan membangun jaringan sistem informasi yang terpadu untuk tercapainya tata kelola yang baik dan dapat mengendalikan akses antar unit kerja sehingga meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku saat menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik oleh pemerintah daerah, salah satu manfaat yang diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang sering terjadi sehingga terjadi peningkatan kinerja pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung dan positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Chintya (2015) mengemukakan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menduga adanya hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja instansi pemerintah daerah, maka penulis mengambil hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya:

Dewi et al. (2015) melakukan penelitian dengan judul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli)*. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan fungsional, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Chintya (2015) melakukan penelitian tentang *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Solok.

Nazir dan Oktari (2013) meneliti tentang *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. Hasil pengujian menyimpulkan variabel pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dan variabel pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Susanti (2014) juga melakukan penelitian tentang *Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Siak)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi Kabupaten Siak.

Nurlaili (2014) meneliti tentang *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif

terhadap kinerja instansi SKPD. Semakin tinggi tingkat Pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya, semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang menunjukkan arah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi penelitian merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Riduwan, 2003). Obyek dalam penelitian ini adalah pegawai di dinas-dinas di Kota Surabaya.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi dan bagian anggaran. Kuesioner dibagikan pada 17 SKPD Kota Surabaya sebanyak 68 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan metode *survey* dengan bantuan kuesioner. Kuesioner penelitian ini dikirimkan langsung kepala sub bagian, pegawai bagian keuangan dan sekertariat yang berada di SKPD Kota Surabaya untuk menjawabnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Indikator pengukuran variabel ini dikembangkan dari Ashari (2013): a) Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran b) Kualitas pemikiran yang diberikan pada anggaran yang disusun c) Frekuensi menyatakan usulan pendapat tentang anggaran d) Pengaruh pemikiran yang diutarakan terhadap anggaran yang disusun e) Frekuensi kontribusi dalam mengutarakan pendapat.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah sejauh mana tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, dan perilaku yang dimiliki seseorang. Indikator pengukuran yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015) adalah sebagai berikut: a) Pengetahuan b) Pendidikan c) Keterampilan d) Sikap dan perilaku.

3. Sistem Pengendalian intern

PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator pengukuran yang dari PP No. 60 Tahun 2008 oleh Sudiarianti (2015) antara lain: a) Lingkungan pengendalian b) Penilaian risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan komunikasi e) Pemantuan pengendalian intern.

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Teknologi yang digunakan di sistem teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi apapun yang memberikan nilai tambah untuk organisasi (Jogiyanto, 2005:7). Pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang dikembangkan oleh Vionita (2015). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini adalah a) Penggunaan komputer b) Jaringan internet

Variabel Dependen

Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran ini menggunakan kuisoner yang dikembangkan oleh Nurlaili (2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut: a) Kelompok masukan (*input*) b) Kelompok proses (*process*) c) Kelompok keluaran (*output*) d) Kelompok hasil (*outcome*) e) Kelompok manfaat (*benefit*) f) Kelompok dampak (*impact*).

Pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel, diukur dengan Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 poin skala likert, mulai dari pertanyaan yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan lain-lain (Ghozali, 2016).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas merupakan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur dan alat ukur tersebut dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk *degree of freedom* (df) = jumlah konstruk-2. Jika rhitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlation*) > r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2016). Dengan kata lain suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesio ner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas/independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi, yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1PPA + \beta_2SPI + \beta_3PTI + \beta_4KSDM + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Kinerja Instansi Pemerintah
α	: Konstanta
β_{1-4}	: Koefesien Regresi
PPA	: Partisipasi Penyusunan Anggaran
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
PTI	: Pemanfaatan Teknologi Informasi
KSDM	: Kualitas Sumber Daya Manusia
ε	: Koefesien Error

Uji Koefisien determinasi (uji R²)

Uji Koefisien determinasi (uji R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika variabel R² memiliki nilai 0 atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan, tetapi jika variabel R² memiliki nilai 1 atau mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F (*Goodness of Fit*)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Adapun kriteria dalam pengujian:

- Jika nilai signifikan uji F > 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya.
- Jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengangapi variabel independen lainnya konstan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 0.05 ($\alpha = 5\%$) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan uji t > 0.05 maka hipotesis ditolak
- Jika nilai signifikan uji t \leq 0.05 maka hipotesis diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 18 Dinas, 10 Lembaga Teknis, Kecamatan, masing-masing dipimpin oleh seorang camat, Kelurahan, masing-masing dipimpin oleh seorang lurah.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Penyusunan Anggaran	64	2.00	5.00	3.66015	.7145975
Kualitas Sumber Daya Manusia	64	3.00	5.00	4.20739	.5267272
Sistem Pengendalian Intern	64	3.73	5.00	4.33229	.374588
Pemanfaatan Teknologi Informasi	64	3.42	5.00	4.39508	.4515685
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	64	3.25	5.00	4.20937	.4615255
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1, nilai rata-rata variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 3,66051 menunjukkan rata-rata jawaban responden setuju dengan adanya keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran sehingga akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Nilai rata-rata variabel kualitas sumber daya manusia adalah 4,20739 menunjukkan rata-rata jawaban responden sangat setuju dengan adanya berbagai pelatihan-pelatihan pengembangan pengetahuan dan kemampuan akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Nilai rata-rata variabel sistem pengendalian intern adalah 4,33229 menunjukkan rata-rata jawaban responden sangat setuju dengan adanya sistem pengendalian yang memadai akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Nilai rata-rata variabel pemanfaatan teknologi adalah 4,20937 menunjukkan rata-rata jawaban responden sangat setuju dengan adanya pemanfaatan teknologi yang baik maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	R table	Keputusan
Kinerja Instansi Pemerintah	Y.1	0.543	0.246	Valid
	Y.2	0.603	0.246	Valid
	Y.3	0.693	0.246	Valid
	Y.4	0.772	0.246	Valid
	Y.5	0.743	0.246	Valid
	Y.6	0.749	0.246	Valid
	Y.7	0.748	0.246	Valid
	Y.8	0.765	0.246	Valid
	Y.9	0.746	0.246	Valid
	Y.10	0.622	0.246	Valid
	Y.11	0.630	0.246	Valid
	Y.12	0.663	0.246	Valid
	Y.13	0.663	0.246	Valid
	Y.14	0.528	0.246	Valid
	Y.15	0.680	0.246	Valid
	Y.16	0.692	0.246	Valid
	Y.17	0.753	0.246	Valid
	Y.18	0.704	0.246	Valid
	Y.19	0.759	0.246	Valid
	Y.20	0.627	0.246	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keputusan
Partisipasi Penyusunan Anggaran	X1.1	0.712	0.246	Valid
	X1.2	0.864	0.246	Valid
	X1.3	0.831	0.246	Valid
	X1.4	0.802	0.246	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keputusan
Kualitas Sumber Daya Manusia	X2.1	0.765	0.246	Valid
	X2.2	0.742	0.246	Valid
	X2.3	0.521	0.246	Valid
	X2.4	0.726	0.246	Valid
	X2.5	0.668	0.246	Valid
	X2.6	0.773	0.246	Valid
	X2.7	0.797	0.246	Valid
	X2.8	0.846	0.246	Valid
	X2.9	0.845	0.246	Valid
	X2.10	0.775	0.246	Valid
	X2.11	0.809	0.246	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keputusan
Sistem Pengendalian Intern	X3.1	0.489	0.246	Valid
	X3.2	0.613	0.246	Valid
	X3.3	0.626	0.246	Valid
	X3.4	0.700	0.246	Valid
	X3.5	0.587	0.246	Valid
	X3.6	0.650	0.246	Valid
	X3.7	0.476	0.246	Valid
	X3.8	0.681	0.246	Valid
	X3.9	0.607	0.246	Valid
	X3.10	0.497	0.246	Valid
	X3.11	0.631	0.246	Valid
	X3.12	0.597	0.246	Valid
	X3.13	0.722	0.246	Valid
	X3.14	0.546	0.246	Valid
	X3.15	0.493	0.246	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keputusan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X4.1	0.501	0.246	Valid
	X4.2	0.703	0.246	Valid
	X4.3	0.507	0.246	Valid
	X4.4	0.607	0.246	Valid
	X4.5	0.725	0.246	Valid
	X4.6	0.717	0.246	Valid
	X4.7	0.629	0.246	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2017

Hasil pengujian validitas pada variabel kinerja instansi pemerintah, partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan valid karena nilai r_{hitung} yang didapatkan lebih besar dari r_{tabel} (r_{tabel} didapatkan dari rumus ($df = n-2$,

$\alpha=0,05$) jadi $64 - 2 = 62$ maka nilai r tabel $df=62; \alpha=0,05=62$ adalah 0,246. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	<i>CronbachAlpha</i>	Keterangan
1.	Kinerja Instansi Pemerintah	0,951	Reliabel
2.	Partisipasi Penyusunan Anggaran	0.912	Reliabel
3.	Kualitas Sumber Daya Manusia	0.940	Reliabel
4.	Sistem Pengendalian Intern	0.904	Reliabel
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.848	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2017

Pada tabel 7 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel sudah *reliable*, karena nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$, sehingga dapat dikatakan alat ukur yang digunakan handal atau *reliabel*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Partisipasi Penyusunan Anggaran	0.442	2.264
	Kualitas Sumber Daya Manusia	0.374	2.670
	Sistem Pengendalian Intern	0.459	2.180
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.517	1.933

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa nilai VIF dalam kolom *Collinearity Statistics* untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 2,264, kualitas sumber daya manusia sebesar 2,670, sistem pengendalian intern sebesar 2,180, dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,933. Kesimpulan dari pengujian ini adalah nilai VIF dari variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak lebih atau < 10 .

Nilai *tolerance* dalam kolom *Collinearity Statistics* untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,442, kualitas sumber daya manusia sebesar 0,374, sistem pengendalian intern 0,459, dan pemanfaatan teknologi informasi 0,517 tidak kurang atau $> 0,1$. Maka kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi multikolonieritas (tidak terjadi adanya korelasi diantara variabel independen).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	5.453	8.165		.668	.507	
1	Partisipasi Anggaran	.734	.322	.227	2.279	.026
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.537	.172	.337	3.111	.003
	Sistem Pengendalian Intern	.384	.161	.234	2.393	.020
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.591	.269	.202	2.198	.032

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.453 + 0,734PPA + 0,537KSDM + 0,384SPI + 0,591PTI + \epsilon$$

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.861 ^a	.741	.724	4,85311	1,509

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,741 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 74,1%, sedangkan sisanya 25,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Nilai R² mendekati angka 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F (Goodness of Fit)**Tabel 11**
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3978.143	4	994.536	42.226	.000b
Residual	1389.607	59	23.553		
Total	5367.750	63			

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42,226 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini sesuai atau *fit*.

Uji t**Tabel 12**
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.453	8.165		.668	.507
1 Partisipasi Anggaran	.734	.322	.227	2.279	.026
Kualitas Sumber Daya Manusia	.537	.172	.337	3.111	.003
Sistem Pengendalian Intern	.384	.161	.234	2.393	.020
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.591	.269	.202	2.198	.032

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berikut adalah pembahasan dari hasil pengujian uji t :

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui Nilai B *unstandardized* sebesar 0,734 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$), sehingga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai B *unstandardized* sebesar 0,537 dengan signifikansi sebesar 0,003 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$), sehingga kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai B *unstandardized* sebesar 0,384 dengan signifikansi sebesar 0,020 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga sistem pengendalian intern

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai *B unstandardized* sebesar 0,591 dengan signifikansi sebesar 0,032 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis pertama (H_1) diterima yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan partisipasi penyusunan anggaran.

Partisipasi anggaran adalah tingkat sejauh mana individu terlibat dan berpengaruh dalam menentukan dan menyusun anggaran suatu organisasi baik secara periodik maupun tahunan. Keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu organisasi sangatlah penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bagian untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang di embannya sehingga pegawai dan kepala bagian dapat meningkatkan kinerja agar tercapainya target anggran (Dewi et al, 2015).

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka (Agusti, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agusti, 2012) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dewi et al., (2015) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Pengujian ini membuktikan bahwa keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis kedua (H_2) diterima yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* yang dimaksudkan berupa pengetahuan, pendidikan, sikap, hubungan, produktivitas, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk sebagai input dalam perolehan kinerja yang maksimal. Ariesta (2013) mengatakan apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Dewi et al., 2015). Sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi yang memiliki kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan

dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan salahsatu faktor yang terpenting dalam meningkatkan kinerja.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah karena sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan agar kinerja yang dihasilkan telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi et al. (2015) mengemukakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka kinerja pemerintah juga akan semakin tinggi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis ketiga (H_3) diterima yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan adanya sistem pengendalian intern.

American Instute of Certified Public Accounting mendefenisikan pengendalian intern, yaitu meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat dikordinasikan, yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa kebenaran data akuntansi, memajukan efesiensi didalam operasi dan data akuntansi, memajukan efesiensi didalam operasi dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan diterapkan sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi diharapkan dapat mengurangi terjadinya eksposur-eksposur dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik pula, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian Chintya (2015) mengemukakan pengendalian intern pemerintah pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Solok. Serta mengacu pada penelitian Dewi et al. (2015) berhasil menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern dengan kinerja instansi pemerintah.

Nurlaili (2014) juga menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD kabupaten Jember.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis keempat (H_4) diterima yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah juga diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi semaksimal mungkin.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik oleh pemerintah daerah, salah satu manfaat yang diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang sering terjadi sehingga terjadi peningkatan kinerja pula. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung dan positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya.

PP No.56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang mewajibkan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan membangun jaringan sistem informasi yang terpadu untuk tercapinya tata kelola yang baik dan dapat mengendalikan akses antar unit kerja sehingga meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan dalam pemenuhan tugas dan

tanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku saat menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chintya (2015) mengemukakan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan, Nazir dan Oktari (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil kuesioner yang dibagikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan partisipasi penyusunan anggaran. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan adanya sistem pengendalian intern. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah juga diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi semaksimal mungkin.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah., saran-saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,741 atau 74,1% dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi, dan sisanya yaitu sebesar 25,9% dapat dijelaskan variabel lain diluar model, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan gaya kepemimpinan.

Jumlah obyek untuk peneliti selanjutnya dapat ditambahkan lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kinerja instansi pemerintah menjadi kuat. Menambahkan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara langsung sehingga peneliti dapat meyakini jawaban yang diberikan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R. 2012. Pagaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*. Vol 20(3).
- Arfianti, D. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang
- Ariesta, F. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

- Pemda (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Ashari, B. 2013. Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Organisasi dan Struktur Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi*. Vol 1(3).
- Azhar. 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Skripsi*. Program Paccs Sarjana USU. Medan
- Baridwan, Z. 2005. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi 7. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Chintya, I. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- COSO.2013. *Internal Control - Integrated Framework*. American Institute of Certified Public Accountants
- Dewi, M. S., N. A. S. Dharmawan, dan D. N. S. Werastuti. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *Jurnal S1 Akuntansi Pendidikan Ganesha*. Vol 3(1).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hansen dan Mowen. 2002. *Akuntansi Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Jallaludin. dan Bahri, D. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 2(1):43-45.
- Jogiyanto. 2005. *Sistem Teknologi Informasi*. Edisi II. Andi. Yogyakarta.
- Kalalo, Nadya P., Tinangon, Jantje J., Elim, Inggriani. 2014. Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 2(1):606-616.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nazir, A. dan R. Oktari. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Nurlaili, A. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Jember). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Riduwan. 2003. *Dasar-dasar Statistika*. Edisi Revisi. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sangadji, M.E. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, I. 2014. Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Siak). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*.

Vionita, N. E. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Wijana, N. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. *Jurnal*. Universitas Udayana. Bali.